

KEKERASAN POLITIK DAN KERUSUHAN SOSIAL DALAM PEMILUKADA

Oleh : Ari Pradhanawati

Abstract :

Political violence during local elections (pemilukada) that had been conducted since 2005 generate unsatisfactory situation that create anarchism among civilian. This paper discuss about political violence and social riot from Sociology standpoint. It employ social definition paradigm by focusing on the Theory of Communication Action by Jurgen Habermas. This article explain that the social riot/ anarchism is caused by the lack of citizen' maturity and understanding about how to conduct a 'good' political communication. This situation also reflect the level of rationality of Indonesian people in term of its maturity to respond political issue. This discussion conclude that there is an unbalance cross-communication among stakeholders that ultimately lead to form structural anarchism. To overcome this problem, the author offer a concept of communicative society that expectantly become an alternative method to develop new consensus for running political process in order to reduce the violence and social riot in the general election.

Key Words : *political violence; social riot; local election*

PENDAHULUAN

Demokratisasi di Indonesia saat ini sudah menjadi perhatian dunia luar yaitu sejak diselenggarakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2004 secara langsung dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2005 yang sekarang disebut dengan Pemilukada. Tetapi hal ini merupakan sebuah realitas bahwa demokrasi di Indonesia harus dipahami sebagai bangunan demokrasi yang masih rapuh dan tidak sedikit dana yang dibutuhkan demi sebuah pemilihan-pemilihan pejabat politik (*electd officials*) yang *legitimate*. Sehingga banyak hal yang perlu disikapi sehubungan dengan proses dan hasil pemilukada yang seringkali menimbulkan ketidakpuasan rakyat dalam bentuk kekerasan sampai melakukan gugatan ke mahkamah konstitusi (MK).

Ketidakpuasan rakyat terhadap demokratisasi khususnya dalam penyelenggaraan pemilukada dimulai dari daftar pemilih yang kurang akurat sehingga menyebabkan banyak pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), pemilih ganda, persoalan pencalonan misalnya penggunaan ijazah palsu atau dugaan terhadap ijazah palsu yang dilakukan oleh calon, penggantian pasangan calon dalam proses perbaikan syarat administrasi, pembelian suara secara massif, curi start kampanye, kampanye hitam, melakukan politik uang menjelang hari H pemungutan suara, penyelenggara pemilukada dan

pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak netral sampai pencopotan anggota KPUD, kerancuan dalam rekapitulasi penghitungan suara, massa yang tidak mau menerima hasil pemilukada sampai penundaan pelantikan calon terpilih, dlsb. Permasalahan tersebut berakhir dengan adanya kekerasan yang mengarah ke anarkisme, misalnya massa mengepung atau merusak atau membakar ban mobil atau membakar: mobil, kantor komisi pemilihan umum daerah (KPUD), gedung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang ada disekitar kejadian kerusuhan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka tulisan berikut ini akan membahas sejauhmana kekerasan politik dan kerusuhan sosial dalam penyelenggaraan pemilukada ditinjau dari sudut pandang sosiologi yaitu dengan menggunakan paradigma definisi sosial, sedangkan teori yang digunakan adalah teori tindakan komunikasi Jurgen Habermas.

PEMBAHASAN

Berbicara mengenai kekerasan (*violence*) berarti kita harus membicarakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan. Douglas dan Waksler (dalam Santoso, 2002, 11) menjelaskan bahwa kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, sehingga kekerasan dapat diidentifikasi menjadi : (1) kekerasan terbuka,

misalnya perkelahian; (2) kekerasan tertutup, misalnya mengancam; (3) kekerasan agresif, misal untuk mendapatkan sesuatu; (4) kekerasan defensif, misal untuk perlindungan.

Mahatma Gandhi berpendapat bahwa kekerasan bisa dihapus kalau kita tahu penyebabnya. Penyebab kekerasan terletak pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahat di pihak lain (Windhu dalam Santoso, 2002, 168).

Galtung (Windhu dalam Santoso, 2002:168) menyatakan bahwa kekerasan didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara potensial dan yang aktual artinya apa yang bisa atau mungkin diaktualisasikan harus direalisasikan. Galtung (Windhu dalam Santoso, 2002:169) juga membedakan kekerasan personal dan kekerasan struktural. Sifat kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan. Sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak.

Lain halnya dengan Camara (2000:31-39) yang menjelaskan bahwa ketidak-adilan adalah sebuah kekerasan mendasar (kekerasan nomor 1), kemudian kekerasan nomor 1 itu memancing kekerasan nomor 2 berupa pemberontakan, selanjutnya kekerasan nomor 2 mengundang datangnya kekerasan nomor 3 yaitu berbentuk represi. Proses dari ketiga kekerasan tersebut seperti spiral karena kekerasan demi kekerasan saling mendorong atau terpilin-pilin maka terbentuklah Spiral Kekerasan. Sedangkan Gurr dalam Istania (2009: 3-4) menganalisis terjadinya kekerasan politik yaitu akibat terjadinya kesenjangan relatif. Menurut Gurr, ada tiga macam kategori kekerasan pada satu wilayah ataupun bangsa berdasarkan magnitude atau daya rusaknya, yaitu:

- a. Kerusakan, ciri spontan, tidak terorganisir dengan tingkat partisipasi populer cukup besar, termasuk mogok berujung kekerasan, kerusakan, *clash* politik, dan pemberontakan lokal,
- b. Konspirasi, ciri kekerasan politik terorganisasi secara baik dengan partisipasi terbatas, terorisme skala kecil, perang gerilya skala kecil, kudeta, dan pembangkangan militer,
- c. Perang internal, ciri kekerasan politik terorganisir rapih dengan partisipasi luas, didesain menjatuhkan rejim atau menghancurkan negara dan disertai dengan kekerasan meluas, termasuk terorisme skala besar dan perang gerilya, dan revolusi.

Selanjutnya studi yang dilakukan Gurr

(dalam Surwandono, 2009:10), kekerasan itu muncul sebagai akibat terciptanya deprivasi relatif, yakni terdapatnya kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*expectation*) dengan sesuatu yang diperoleh (*realities*). Semakin lebar jarak kesenjangan antara ekspektasi dengan apa-apa yang diperoleh akan semakin besar pula peluang terjadinya konflik dan kekerasan.

Lalu, bagaimana kekerasan terutama kekerasan politik yang terjadi di Indonesia Lembaga pengkaji masalah sosial politik, Internasional Crisis Group (ICG), mencatat sekitar 10% dari 200 pemilukada yang diselenggarakan pada 2010 telah diwarnai aksi kekerasan. Misalnya kekerasan yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, Tana Toraja di Sulawesi Selatan dan Toli-toli di Sulawesi Tengah, dlsb. Temuan lembaga ini menunjukkan, kekerasan dalam pilkada antara lain dipicu oleh lemahnya posisi penyelenggara pemilukada yaitu KPUD dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang tidak independen (partisan) dan tidak cerdas, serta konflik antar peserta pemilukada.

Data dari *Crisis Group Asia Report N°197* (2010:i) menjelaskan bahwa jumlah kekerasan yang terjadi dalam 224 pemilukada yang terjadwal pada 2010 tidak sampai 10% (20 kasus kekerasan), sedangkan sepanjang pemilukada 2005-2008 mencatat ada 13 kasus kekerasan. Penyebab dari kasus kekerasan tersebut antara lain, kemarahan masyarakat atas politik kekerabatan (*incumbent* mengajukan keluarga sebagai kandidat), buruknya tata pemerintahan, termasuk kasus di Kabupaten Kaur Bengkulu pada 27 Juni 2005, aksi kekerasan terjadi ketika muncul kekecewaan dari pasangan calon beserta pendukungnya yang kalah dalam pilkada (sejak 2010 istilahnya menjadi pemilukada), kemudian membakar kantor KPUD, gedung DPRD, kantor Kecamatan Kaur Selatan, termasuk menghancurkan dokumen-dokumen, termasuk membakar rumah dinas Ketua DPRD, Kantor Urusan Agama dan Dinas Pekerjaan Umum, dlsb. Kekerasan juga terjadi dalam pilkada di Kabupaten Tuban Jawa Timur, setelah pelaksanaan pilkada pada 29 April 2006, yaitu pembakaran gedung-gedung milik pemerintah juga asset pribadi milik salah satu calon (*incumbent*), penyebabnya ada calon yang merasa menang dan merasa di atas angin ternyata kalah oleh *incumbent*, penyebab lainnya adalah kekecewaan para elit lokal termasuk pengusaha lokal yang sudah lama termaginalkan oleh keluarga *incumbent* (Marijan, 2007:4 & 6).

Sementara itu, hasil penelitian LIPI terhadap pemilukada di 491 kabupaten/kota antara Juni 2005 hingga 2008, menemukan sekitar 10-15%

pemilukada telah diwarnai aksi kekerasan. Konflik yang muncul dalam pemilukada tersebut lebih banyak karena faktor ketidak-puasan terhadap kepala daerah terpilih, yang diduga melakukan praktek politik uang.

Sedangkan beberapa kasus kekerasan yang muncul saat penyelenggaraan pemilukada sejak 2010, menurut data dari *Crisis Group Asia Report N°197 (2010:25-27)* adalah:

Kasus di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (10 April 2010), massa dari bupati *incumbent* (petahana) Zulkifli Muhadi dan lawannya Andi Azisi saling melempar batu setelah kelompok sang penantang mencoba menghalangi konvoi rivalnya. Pendukung Andi berunjuk rasa mempermasalahkan keaslian ijazah sang *incumbent*. Pada tanggal 28 April, ratusan demonstran bentrok dengan polisi ketika mereka menuntut KPUD untuk menghentikan proses rekapitulasi setelah berita kemenangan sang *incumbent* mulai terhembus. Mereka terus meminta polisi untuk menyelidiki keabsahan ijazah Zulkifli. Ketika mereka hendak merangsek ke dalam kantor KPUD, polisi menahan mereka dengan hantaman tongkat dan tembakan peringatan serta gas air mata.

Kasus di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (12 Mei 2010). Ribuan warga memblokir jalan menuju ibukota kabupaten di Larantuka sehingga anggota KPU pusat dan propinsi tak bisa masuk kota. Mereka tadinya ingin mengumumkan kebijakan menganulir keputusan KPUD Kabupaten Flores Timur yang mendiskualifikasi pencalonan *incumbent* Simon Hayon. Para demonstran menuntut agar proses pemilukada diteruskan tanpa sang bupati dan merasa pihak pusat ingin mengintervensi politik tingkat lokal. Pada tanggal 14 Mei 2010, pendukung-pendukung Simon memaksa KPUD untuk mengikuti keputusan KPU yang lebih tinggi dan polisi menemukan mereka membawa bom Molotov. Pada bulan Juli 2010, KPU memberhentikan empat dari lima orang anggota dari KPUD yang menolak keputusan KPU itu. Pada tanggal 1 November 2010, KPUD baru dibentuk dengan dengan mandat untuk melaksanakan pemilukada pada tahun 2011.

Kasus di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (12 Mei 2010). Ratusan demonstran merusak kantor KPUD saat proses rekapitulasi setelah mendengar kabar bahwa *incumbent* Imran menang besar pada pemilu tanggal 8 Mei 2010. Mereka menuduh sang bupati telah menyalahgunakan jabatan dan membagi uang kepada pemilih. Pada

bulan Juni, lawan politik Imran membawa kasus ke MK yang memutuskan perlu dilakukan pemilihan ulang namun Imran tidak didiskualifikasi. Dalam pemilihan ulang 11 Juli 2010, sang *incumbent* malahan mendapatkan suara yang lebih banyak dan ini memicu protes yang lebih besar pada tanggal 19 Juli 2010 yang berakhir dengan bentrok antar pendukung.

Kasus di Kota Sibolga, Sumatra Utara (15 Mei 2010). Empat kantor kecamatan yang menyimpan kotak-kotak suara dibakar dua hari setelah pemungutan suara tanggal 13 Mei 2010 yang diwarnai pertarungan antara wakil bupati Afifi Lubis dan mantan anggota DPR Syarfi Hutauruk yang berpasangan dengan mantan bupati yang tak dapat maju lagi. Pendukung Afifi menuduh sang bupati memakai jabatannya untuk menghalangi-halangi pencalonan wakilnya itu namun protes ini hanya terdengar setelah *quick count* meramalkan Syarfi unggul.

Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (12 Mei 2010). Warga merusak kantor KPUD dan Panwaslu setelah mereka mendengar laporan sementara yang mengindikasikan kemenangan untuk Suryadman Gidot pada pemungutan suara tanggal 19 Mei 2010 padahal wakil bupati itu diyakini melakukan tindakan korupsi. Pada tanggal 18 Mei 2010, seorang pendukung Suryadman tertangkap tangan membagikan uang kepada pemilih.

Kasus di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (21 Mei 2010). Sebuah mobil milik KPUD dibakar orang tak dikenal setelah ada berita yang meramalkan Yasir Ansyari, putra bupati yang tidak bisa maju lagi, gagal mendapatkan 30 persen dari suara yang dibutuhkan untuk mencegah putaran kedua walau ia unggul dari calon-calon lainnya. Dalam putaran kedua, Yasir kalah dari Henrikus yang sebenarnya menempati urutan kedua di putaran pertama.

Kasus di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (24 Mei 2010). Polisi melontarkan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara setelah demonstran menyerang mereka dengan batu. Mereka menuntut penghentian acara misi visi karena jagoan mereka tak diloloskan setelah terjadi suatu kebingungan terhadap keabsahan dukungan partai. Ada dua pihak yang mengatasnamakan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang mendukung dua calon yang berbeda, sang *incumbent* dan bakal calon yang tidak lolos itu. KPUD menerima pendudukan PPRN untuk *incumbent* dan memutuskan calon yang lain gagal memenuhi syarat dukungan.

Kasus di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (9 Juni 2010). Polisi menembakkan peluru karet ke demonstran yang menuntut penghentian proses rekapitulasi yang dilakukan KPUD setelah terjadi kerancuan penghitungan suara di kecamatan Sano Nggoang. Pada saat itu, laporan sementara menyebutkan wakil bupati Agustinus Dula unggul di pemungutan suara tanggal 3 Juni 2010.

Kasus di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara (10 Juni 2010). Ratusan pendukung seorang calon menghalangi kepergian bis-bis yang mengangkut 150 mahasiswa ketika mereka ingin keluar dari wilayah kabupaten setelah ikut pemungutan suara tanggal 9 Juni 2010. Para pendukung tersebut menuduh bupati *incumbent* Mangindar Simbolon telah membayar mahasiswa mahasiswa tersebut untuk menjadi pemilih gelap walau sebenarnya mahasiswa-mahasiswa tersebut merupakan penduduk Samosir yang tengah menempuh studi di Medan. Sang bupati mengaku mengongkosi perjalanan mereka kembali ke kampung halaman.

Kasus di Kabupaten Kepulauan Anambas, Riau Islands (11 Juni 2010). Demonstran anti *incumbent* melempar batu ke sebuah gedung yang dipakai KPUD untuk melakukan rekapitulasi setelah pemungutan suara tanggal 26 Mei 2010. Mereka meruntuhkan pagar ketika mereka memaksa masuk gedung pertemuan itu. Proses penghitungan yang lambat terjadi karena menunggu datangnya semua kotak suara ke tangan KPUD dari berbagai tempat di kabupaten pemekaran ini yang terdiri dari pulau-pulau terpencil yang memiliki infrastruktur yang buruk. Padahal, berita bahwa bupati *incumbent* Tengku Mukhtaruddin telah menang sudah tersebar beberapa jam setelah pemungutan suara. Unjuk rasa sudah berlangsung sejak tanggal 27 Mei 2010 menuduh bupati melakukan pengelembungan suara dan menuntut hasil pemilu dibatalkan. Intensitas terus bertambah seiring lambannya proses penghitungan yang memicu kecurigaan.

Kasus di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 25 Juni dan Agustus-September 2010. Pendukung calon penantang Andi Maddussila memprotes suatu ramalan kemenangan untuk bupati *incumbent* Ichsan Limpo yang keluar dua hari setelah pemungutan suara. Mereka menuduh Ichsan memakai ijazah palsu dan menyandera seorang pendukung sang bupati yang mengakibatkan kelompok lawan untuk melakukan serangan balasan. Kedua kubu saling lempar batu sampai polisi berusaha melerai. Kejadian-kejadian bermunculan secara sporadis termasuk

pembakaran bis, bangunan dan kantor cabang Golkar oleh orang-orang tak dikenal serta perkelahian antar pendukung setelah *incumbent* dilantik tanggal 14 Agustus 2010 yang meletup hingga bulan September. Keluarga Limpo adalah keluarga yang dominan dalam perpolitikan Sulawesi Selatan. Kakaknya Ichsan, Syahrul Limpo, adalah gubernur Sulawesi Selatan sedangkan saudara-saudaranya yang lain menduduki kursi di DPRD. Mereka sebagian besar berasal dari Partai Golkar.

Kasus di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku (20 Juli 2010). Pendukung bupati Abdullah Vanath dan lawannya Mukti Keliobas yang menjabat ketua DPRD berbaku hantam di jalanan setelah sang *incumbent* menang mutlak pada pemungutan suara 7 Juli 2010. KPUD menolak permintaan sang penantang untuk penghitungan ulang di pulau terpencil Gorom dimana penyelenggara pemilu ditenggarai telah menggelembungkan suara. Namun, Mukti melapor ke KPU propinsi yang akhirnya memerintahkan KPUD untuk memenuhi tuntutan itu. Ketika KPUD memutuskan untuk tak menggubrisnya, pendukung Mukti menyerang markas lawan dan membakar kantor-kantor pemerintahan. Pada bulan Agustus 2010, MK menolak tuntutan penghitungan ulang itu dan memastikan kemenangan Vanath.

Kasus di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 23-24 September 2010. Pendukung Sugianto Sabran mengamuk setelah keluarnya Keputusan MK untuk menganulir kemenangan calonnya dalam pemungutan suara 5 Juni 2010 karena MK menganggap terjadi usaha pembelian suara yang massif. MK dalam putusannya juga menetapkan bupati *incumbent* Ujang Iskandar sebagai pemenang dan langkah ini memicu tuduhan suatu konspirasi dari Jakarta untuk menggagalkan gerakan pro-perubahan di daerah itu. KPUD menolak untuk mengeksekusi keputusan tertanggal 7 Juli 2010 di tengah meningkatnya ketegangan di daerah itu dan ini membuat KPU Pusat memberi peringatan kepada KPUD pada tanggal 22 September 2010. Keputusan kedua yang berasal dari Jakarta ini memperkuat persepsi bahwa kekuatan pusat sedang mengintervensi urusan daerah dan memicu pembakaran monumen Adipura yang berada di ibukota kabupaten. Lembaga-lembaga setempat menolak melaksanakan keputusan MK itu karena takut menjadi target dari kemarahan kelompok Sugianto sehingga daerah itu dipimpin seorang pejabat sementara sampai sekarang yang tak memiliki hak menentukan anggaran. Pejabat di daerah telah

meminta Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan keputusan MK namun ia masih enggan. Inilah satu-satunya kasus kekerasan yang diakibatkan putusan MK pada tahun 2010.

Kasus di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (24 Oktober 2010). Sebuah bom meledak di kantor KPUD tengah malam, beberapa jam setelah polisi mendorong mundur demonstran yang menggugat kemenangan bupati petahana Ferry Zulkarnain secara sporadis. Salah satu anggota tim sukses dari sang bupati divonis telah melakukan pembelian suara lima hari sebelum pelantikan tanggal 9 Agustus. Pengadilan memutuskan Ferry tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kasus di Kabupaten Karo, Sumatra Utara (1 November 2010). Ratusan orang membakar ban di jalan dan melempar batu ke arah hotel dimana KPUD sedang melakukan rekapitulasi setelah pemungutan suara tanggal 27 Oktober. Para demonstran itu menuntut pemilu ulang dan menuduh kedua calon yang mendapatkan suara terbanyak telah melakukan pembelian suara. Polisi melontarkan gas air mata dan menggunakan tongkat untuk membubarkan massa. Pada tanggal 6 November, sebuah gedung pemerintahan dibakar ditengah malam. Sengketa ini telah dibawa ke MK sehingga putaran kedua menjadi tertunda.

Untuk membahas kasus-kasus kekerasan politik dalam pemilu/kada seperti yang dijelaskan di atas. Ada tiga paradigma dalam sosiologi yang dipakai dalam membahas kasus tersebut, yaitu seperti pandangan Ritzer (2003: 13-83): 1) paradigma fakta sosial yang menyatakan bahwa struktur yang terdalem masyarakat mempengaruhi individu, 2) paradigma definisi sosial yang menyatakan bahwa pemikiran individu dalam masyarakat mempengaruhi struktur yang ada dalam masyarakat, 3) paradigma perilaku sosial yang menyatakan bahwa perilaku keajegan dari individu yang terjadi di masyarakat merupakan suatu pokok permasalahan, dalam hal ini interaksi antarindividu dengan lingkungannya akan membawa akibat perubahan perilaku individu yang bersangkutan. Dengan demikian paradigma yang dipakai dalam membahas kasus-kasus kekerasan tersebut adalah menggunakan paradigma definisi sosial dan teori yang digunakan adalah teori tindakan komunikasi dari Jurgen Habermas.

Pandangan Habermas (1990: 124-153), bahwa politik dapat dirasionalisasikan yang terwujud dalam upaya membangun masyarakat atas dasar hubungan antar pribadi yang merdeka dan memulihkan peran manusia sebagai subyek yang mengatur sejarahnya. Hal ini sejalan dengan

pandangan Weber (1969) dalam Siahaan (1983 : 218 -220), bahwa tindakan sosial seseorang dipengaruhi oleh *zweck rational*, yaitu tindakan sosial yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional di dalam merespon kondisi eksternalnya (termasuk tanggapan terhadap orang lain di luar dirinya dalam upaya mencapai tujuan yang maksimal dengan pengorbanan yang seminimal mungkin). Sedangkan tindakan komunikatif menurut Habermas (1971:53) adalah titik tolak kritik-kritik rekonstruksinya teori rasionalitas Weber, bahwa ada tindakan dasar manusia yang diarahkan oleh norma-norma yang disepakati bersama berdasarkan harapan timbal balik antara subyek yang saling berinteraksi. Kemudian dengan asumsi bahwa masyarakat pada hakekatnya bersifat komunikatif, Habermas (dalam Hardiman, 1993:116) dengan paradigma komunikasi mengutamakan peranan struktur-struktur komunikasi sosial dalam perubahan masyarakat. Sejak pemilu/kada digelar di kabupaten/kota di Indonesia, kerusuhan dan kekerasan acapkali terjadi atau bahkan sudah menjadi bagian integral dari pelaksanaan pemilu/kada. Kondisi tersebut disebabkan karena penyelenggara pemilu/kada (KPUD) tidak melakukan komunikasi dua arah yang efektif dengan peserta pemilu/kada/calon/kandidat, sehingga terjadi kemacetan komunikasi bahkan KPUD dapat dikatakan merupakan lembaga yang super body. Hal ini menyebabkan massa pendukung calon/kandidat melakukan protes dengan cara berdemo bahkan sampai menjurus ke arah kerusuhan sosial karena sudah tidak ada lagi ruang untuk berdialog dan yang ada hanya informasi-informasi yang tidak jelas. Dengan demikian kerusuhan sosial dapat dikatakan, sebagai akibat ketidak-dewasaan rakyat dalam menyikapi suatu komunikasi yang macet, yang sekaligus menggambarkan level rasionalitas pelakunya dalam merespon kondisi tersebut.

Di sisi lain, Habermas (dalam Hardiman, 2009:128) menjelaskan bahwa ruang publik (*public sphere*) memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, agar warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif, sebab ruang publik merupakan syarat penting dalam demokrasi. Habermas (dalam Hardiman, 2010: 185) juga menjelaskan bahwa ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang

mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik bukan hanya sekedar fisik, maksudnya sebuah institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi warga itu sendiri. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya. Ruang publik itu harus mudah diakses semua orang. Dalam konteks pemilu, rakyat yang terlibat dalam hingar bingarnya peristiwa politik masih sebatas sebagai objek bukan subjek, tentu tingkat partisipasi rakyat sangat rendah karena posisinya hanya sebagai pelengkap dalam peristiwa politik bahkan sangat sulit mengembangkan rasionalitas dan tindakan komunikatifnya dan cenderung tidak otonom jika dibandingkan dengan kandidat yang sangat dominan dan dikuasai oleh kapitalistik. Dengan demikian rakyat yang terlibat dalam pemilu jika dikaitkan dengan teori masyarakat komunikatif Habermas, ternyata rakyat tidak memiliki *power reflective* yang memadai. Akibatnya rakyat tidak mampu untuk bertindak secara otonom dalam ruang politik yang seharusnya dapat menciptakan kesepakatan bagi kepentingan bersama untuk melahirkan sebuah konsensus. Dengan demikian konsensus hanya dapat dilahirkan jika rakyat mampu mengembangkan masyarakat komunikatif yang memiliki otonomi.

PENUTUP

Dengan menggunakan paradigma sosial dan pandangan dari Habermas maka kekerasan politik dan kerusuhan sosial dalam pemilu berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, bahwa telah terjadi ketidakseimbangan/kemacetan komunikasi antar lintas *stake holder* politik yang akhirnya menimbulkan kekerasan yang menjurus ke anarkisme secara struktural, tetapi bagi kandidat hal ini merupakan bagian dari solusi politik, karena beberapa fakta menjelaskan bahwa premanisme lebih efektif dari kampanye termasuk pemaksaan kehendak.

Oleh karena itu, berdasarkan teori Habermas, maka konsep masyarakat komunikatif menjadi alternatif yang mampu melahirkan konsensus baru yang harus ditaati dalam proses politik untuk menguraikan kekerasan dan kerusuhan sosial dalam pemilu.

Daftar Pustaka

- Camara, Dom Helder. 2000. **Spiral Kekerasan**. Terjemahan: Komunitas Apiru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gurr, Ted Robert. 1998. *Early warning of ethnopolitical rebellion: In Preventive measures*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- _____, and Barbara Harff. 1996. *Early warning of communal conflict and genocide*. Tokyo: United Nations University Press.
- Habermas, J. 1971. *Toward a Rational Society*. London: Heinemann.
- _____. 1990. **Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi**. Alih Bahasa: Hasan Basri. Jakarta: LP3ES.
- Hardiman, Fresco Budi. 1993. **Menuju Masyarakat Komunikatif**. Yogyakarta: Kanisius
- _____. 2009. **Demokrasi Deliberatif**. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- _____. 2010. **Ruang Publik**. Jogjakarta: Penerbit Kansius.
- Istania Ratri. 2009. Potensi Konflik Etnis-Religius di Tingkat Lokal. **Bahan Ajar Mata Kuliah Dinamika Politik**. Lokal. Jakarta: STIA LAN.
- Marijan, Kacung. 2007. Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal. **Paper**. Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi.
- Ritzer, George. 2003. **Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda**. Ed.1., Cet.4. Alih Bahasa: Alimandan, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada.
- Santoso, Thomas. 2002. **Teori-Teori Kekerasan**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Hotman (et al.), 1983, **Struktur Sosial Kebudayaan Masyarakat Tepian Kota**, Surabaya: Lembaga Penelitian, Universitas Airlangga.
- Surwandono. 2010. **Studi EWS dalam Pemilu**. Surwandono.staff.umy.ac.ic. Diakses 30 Juni 2010.